

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A, Ahsin Tohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).
- Anshori, Imam, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional KY Dalam Pengawasan Peradilan*, Malang, Setara Press.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* 1st ed., vol. 4, Mataram, Mataram University Press.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mustofa, H. W. S. 2013, *Kode Etik Hakim*, Prenada Media.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi : perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pangaribuan, Aristo M.A, 2020, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.
- Pramono, Widyono, 2014, *Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku 1*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Saleh, Imam,A, 2014, *Konsep pengawasan kehakiman: upaya memperkuat kewenangan konstitusional Komisi Yudisial dalam pengawasan peradilan*. Setara Press.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju.
- Soeroso. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Sofyan, A.M, Asis, A, Abd Asis, Ilyas, A, 2020, *Hukum Acara Pidana*. 3rd ed. Jakarta, Prenada Group.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Sunggono, B, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Grafindo Persada Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Raihan Wibowo, 2023

**PERANAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA  
PENGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi:29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Waluyo, B, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategis dan Optimalisasi)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Voermans, W, 2002, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein*, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250)

Keputusan Bersama No.47/2009 MA dan No.2/2009 KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, KY

Peraturan Komisi Yudisial No 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim

Raihan Wibowo, 2023

**PERANAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA  
PENGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi:29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat

**Jurnal:**

- Agusta, M., Afita, C. O. Y., & Syafrinia, S, 2020, *Kode Etik Profesi Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim Yang Berintegritas*, Datin Law Jurnal 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.36355>.
- Ariyanti, V, 2019, *Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4, no. 40: 162–174.
- Jailani, Sofyan, 2015, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945*, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 3: 1–7, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360>.
- I Ketut Patra, J, 2018, *Korupsi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*, Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79. DOI: <http://dx.doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>.
- Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H, 2018, *Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim*, Jurnal Kertha Patrika 3 DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i03.p02>.
- Maggalutung, A Salman, 2014, *Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. Jurnal Cita Hukum Vol 2, no. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>.
- Munzil, F., Wr., I. R., Sukendar, A, 2016, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 1: 25–53, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.
- Rachmawati, Amalia Fadhila, 2021, *Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Eksaminasi: Jurnal Hukum.
- Sembiring, Ricky, 2018, *Keadilan Pancasila Dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Aktual Justice Vol. 3, No 2, DOI:<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.
- Sosiawan, Ulang Mangun, 2020, *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4: 587, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.587-604>.
- Suparto, 2012, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis, dan Italia)*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum VIII, no. 1: 189–203, DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v14i1.1447>

Susanto, Hadi, 2018, *Good Governance Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Hak-Hak Warga Negara*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta Vol 13, DOI: <https://doi.org/10.32834/gg.v13i2.35>.

Wicaksana, Y. P, 2018, *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*, Lex Renaissance, Vol 3, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3> .

Wiriadinata, W 2013, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 48 No 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2014.48.2.513-525>.

Zulhanafi, Hasdi Aimon, Efrizal Syofyan, 2013, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia*, , *Jurnal Kajian Ekonomi*.

### **Terbitan Lembaga:**

Komisi Yudisial RI , 2014, *Studi Perbandingan KY dibeberapa negara*, Jakarta, Sekretariat Jendral KY.

### **Skripsi:**

Anggara, M E, 2019, *Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan PERADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

Tahir, S B, 2019, *Peranan Komisi Yudisial Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah* , UIN Raden Intan Lampung.

Taringan, Abdul Fattah, 2019, *Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Winata, W, 2015, *Upaya pengembalian kerugian masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi melalui instrumen perdata (penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KUHP)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Yurisprudensi:**

Putusan Pengadilan, 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Ps,PN Jakarta Pusat, 23 Agustus 2021

### **Internet**

<https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi> diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 16.40

<https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/mys> diakses pada 7 September 2022 pukul 23.15

Raihan Wibowo, 2023

*PERANAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PENGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi:29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

<https://antikorupsi.org/> diakses pada 7 September 2022 pukul 23.33

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis> diakses pada 13 September 2022 pukul 13.20

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/20391011/kpk-perpanjang-masa-penahanan-eks-mensos-juliari-batubara> diakses pada 13 September 2022 pukul 15.00

<https://inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs/index.php/publik/kategori/1>. diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 12.21

### **Laporan Tahunan Komisi Yudisial:**

Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2019

Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2021

### **Wawancara:**

Wawancara dengan *Staff Pemantauan Komisi Yudisial* pada tanggal 10 Oktober 2022

Wawancara dengan *Staff Analisis Komisi Yudisial* pada tanggal 10 Oktober 2022

Wawancara dengan *Komisioner Komisi Yudisial (2010-2015)* pada tanggal 3 November 2022

Wawancara dengan *Tenaga Ahli Komisi Yudisial* pada tanggal 7 November 2022